

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN CANTIK
KELURAHAN CINTA STATISTIK DI KELURAHAN SUMAHILANG
KECAMATAN PEKANBARU KOTA**

Oleh : Yuri Listriani

Pembimbing: Dedi Kusuma Habibie

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) di Kelurahan Sumahilang, Kota Pekanbaru, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola data di tingkat kelurahan guna mendukung pembangunan berbasis data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan implementasi Edward III, yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik. Terdapat komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait seperti Diskominfo Kota Pekanbaru sebagai penyedia link web kelurahan, Disdukcapil sebagai penyedia data kelurahan, BPS Kota Pekanbaru sebagai Pembina program Kelurahan Cantik, dan Kelurahan Sumahilang sebagai pelaksana. Sumber daya dari instansi pendukung cukup memadai, dan pelaksana menunjukkan komitmen tinggi. Program ini juga diperkuat dengan adanya SOP dan Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru sebagai dasar hukum. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan waktu pelaksanaan yang terbatas akibat tumpang tindih agenda dengan program lain. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru agar implementasi Program Kelurahan Cantik dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci : Program Kelurahan Cantik, Implementasi Kebijakan, Kelurahan Sumahilang

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Kelurahan Cinta Statistik (Beautiful Village) Program in Sumahilang Village, Pekanbaru City, as part of an effort to build data governance at the village level to support data-driven development and improve the quality of public services. This study used a descriptive qualitative method with the Edward III implementation approach, which encompasses four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that the program has run quite well. There is effective communication between relevant parties, such as the Pekanbaru City Communication and Information Office (Diskominfo) as the village web link provider, the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) as the village data provider, the Pekanbaru City Statistics Agency (BPS) as the Kelurahan Cantik (Beautiful Village) program supervisor, and Sumahilang Village as the implementing agency. Resources from supporting agencies are adequate, and implementers demonstrate high commitment. The program is also strengthened by SOPs and a Circular Letter from the Mayor of Pekanbaru as the legal basis. However, implementation still faces obstacles, such as limited human resources and

infrastructure, and limited time due to overlapping agendas with other programs. Therefore, ongoing attention and support from the Pekanbaru City Government is needed to ensure the implementation of the Beautiful Village Program is more optimal and sustainable in the future.

Keywords: Beautiful Village Program, Policy Implementation, Sumahilang Village

PENDAHULUAN

Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program Kelurahan Cantik, setiap kecamatan di Pekanbaru memiliki peluang untuk mengikuti program Kelurahan Cantik, namun dalam program ini hanya dilaksanakan oleh satu kelurahan dalam satu kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan oleh BPS Kota Pekanbaru. Program Kelurahan Cantik juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Pekanbaru yakni dengan adanya Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2024, yang mengarahkan seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program Kelurahan Cantik di Kota Pekanbaru. Seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru telah terlibat dalam program ini, dan setiap kelurahan yang terpilih dari setiap kecamatan telah mendapatkan pendampingan serta pembinaan dari staff BPS Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan dan pembinaan kegiatan statistik.

Program Kelurahan Cantik merupakan usaha pemerintah untuk membuat sebuah data yang akurat, akuntabel dan terkini yang merupakan wewenang Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana kegiatan statistik nasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, BPS memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi

kegiatan statistik sektoral, serta membina sistem statistik nasional agar seluruh data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Dalam pelaksanaan program ini Kota Pekanbaru melaksanakan pada 15 Kelurahan se Kota Pekanbaru. Salah satunya dilaksanakan di Kelurahan Sumahilang pada Tahun 2024. Program Kelurahan Cantik mulai dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 2021 dengan memilih 100 desa/kelurahan secara nasional. Upaya yang dilakukan BPS sebagai penyedia data bagi pemerintah pusat dan daerah, BPS melaksanakan program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik).

Kelurahan Cantik merupakan sebuah program pembinaan yang dilakukan oleh BPS ditingkat desa/kelurahan. Program Kelurahan Cantik merupakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa/kelurahan dalam mengelola serta memanfaatkan data secara optimal. Salah satu alasan utama BPS untuk melaksanakan program Kelurahan Cantik ialah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dipemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan data dan literasi statistik.

Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) sebagai program baru yang di luncurkan pemerintah untuk pembangunan Desa. Menurut Purwanto (2020) menyebutkan, program adalah hasil dari sebuah proses perencanaan, yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dirancang secara sistematis yang didasarkan pada data yang valid untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) merupakan upaya

pembinaan statistik sektoral yang dirancang untuk membantu pemerintah kelurahan untuk mengelola data secara lebih baik, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sementara Qomariyah (2022) menyebutkan bahwa, program ini sebagai langkah untuk menjadikan kelurahan sebagai penghasil data yang berkualitas sekaligus pengguna tersebut dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Indrajit (2021) menegaskan sebagai langkah awal bagi pembangunan Desa yang berbasis teknologi informasi, program ini bertujuan membantu pemerintah terutama kelurahan yang disajadkan sasaran program agar lebih menyadari bahwa, data merupakan sebuah aset yang penting yang harus dikelola dengan baik, guna mendukung proses pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

Dalam program tentunya tidak lepas dari implementasi. Implementasi menurut Bintoro Tjokroadmojo (2000) juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas. Proses implementasi tersebut dimulai dari kebijakan tersebut dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, lalu dilaksanakan menjadi sebuah program.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak pandangan dari berbagai tokoh mengenai faktor atau variabel yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan itu diimplementasikan (dalam Sujianto, dkk 2012). Implementasi kebijakan publik, Wilson (dalam Hasim, dkk 2022) merumuskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-

penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Implementasi menurut George Edward III (Joko Pramono, 2020) menyampaikan bahwa, implementasi memegang peranan penting dalam dunia administrasi sekaligus kebijakan publik. Edward menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap kebijakan antara kebijakan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam teorinya, Edward menyebutkan ada empat komponen dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, dimana dalam pelaksanaan kebijakan sangat dibutuhkan sebuah komunikasi. Dalam komunikasi tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan yang akan dilaksanakan disampaikan kepada pihak-pihak pelaksana maupun masyarakat. Dalam komunikasi agar dapat efektif terdapat unsur penting yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber Daya, berkaitan dengan tenaga pelaksana, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan.
3. Disposisi, fokus pada karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana bersikap aktif dan positif, maka pelaksana tersebut akan menjalankan kebijakan dengan serius dan sesuai harapan. Agar pelaksanaan berjalan dengan efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program.
4. Struktur Birokrasi, memegang peranan penting untuk keberhasilan program yang dilaksanakan. Dalam program terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berfungsi sebagai panduan bagi para pelaksana

dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi juga tidak lepas dari kewenangan yang dapat digunakan pelaksana, dimana adanya hubungan antar unit dalam organisasi dan aspek-aspek struktural lainnya sesuai dengan SOP.

Dalam hal ini, implementasi tidak hanya memerlukan kesiapan teknis tetapi juga diperlukan adanya koordinasi dan komitmen dari para pelaksana program agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Guntur Setiawan (2004) juga menjelaskan bahwa implementasi adalah perluasan dari serangkaian aktivitas yang saling menyesuaikan melalui proses interaksi antara tujuan dan tindakan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pelaksana yang aktif serta adanya dukungan birokrasi yang efektif. Dengan hal ini juga dapat dilihat keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh hubungan antar pelaksana dan kesiapan sistem pendukung di lapangan.

Program Kelurahan Cantik di Kelurahan Sumahilang dilaksanakan sebagai langkah baru untuk meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik di kelurahannya. Pelaksanaan program di Kelurahan ini melibatkan banyak pihak untuk mendukung keberhasilan program ini.

Keberhasilan program Kelurahan Cantik ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya materi atau dukungan teknologi, namun dapat dilihat sejauh mana di dalamnya, ketersediaan sumberdaya, sikap dan komitmen pelaksana, serta dukungan struktur birokrasi yang ada.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi program serta hambatan dalam pelaksanaan program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2013) penelitian Kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sebuah masalah. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumahilang Pekanbaru Kota dikarenakan Kelurahan Sumahilang belum memiliki website kelurahan serta aparatur kelurahan memiliki kompetensi yang rendah. Pengumpulan data bersumber dari data primer yakni dilakukan dengan observasi, wawancara dengan Pranata Ahli Komputer Pertama Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, pranata computer ahli muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Staff Analis Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Lurah Kelurahan Sumahilang, Staff Kelurahan Sumahilang, dan Siswa Magang di Kelurahan Sumahilang, serta dokumentasi. Sumber sekunder dalam penelitian ini dari data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan, data Kelurahan Sumahilang dan sebagainya. Analisis data dilakukan dengan acuan Miller yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam rangkaian proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh public. Meskipun sebuah kebijakan telah dirancang dan dirumuskan secara baik pada tahap perencanaan, tanpa pelaksanaan yang optimal kebijakan itu bisa kehilangan arah dan tujuan utamanya. Implementasi program merujuk pada proses pelaksanaan suatu program yang melibatkan berbagai pihak baik individu, organisasi, maupun prosedur tertentu dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu program dapat dianalisis melalui berbagai faktor yang terkait dalam proses pelaksanaannya. Dalam membahas implementasi Program Kelurahan Cantik di Kelurahan Sumahilang, penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan elemen utama dalam keberhasilan setiap program. Adanya komunikasi yang transparan, jelas dan konsisten antara pihak yang mengambil keputusan dan pelaksana program sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, strategi, serta tanggung jawab masing-masing. Dalam pelaksanaan program Kelurahan Cantik melibatkan beberapa pihak yakni BPS Kota Pekanbaru, Disdukcapil Kota Pekanbaru, Diskominfo Kota Pekanbaru, serta aparatur Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota.

Komunikasi Badan Pusat Statistik dengan Kelurahan Sumahilang dilakukan secara langsung melalui pembinaan rutin oleh BPS tanpa menggunakan surat resmi, karena dasar pelaksanaan sudah ditegaskan melalui surat edaran Wali Kota Pekanbaru. Pihak kelurahan aktif menyampaikan kendala yang dihadapi langsung kepada pembina program, sehingga permasalahan dapat segera ditangani. Pola komunikasi ini bersifat dua arah, terbuka, dan responsif. Disamping itu Badan Pusat Statistik melakukan juga melakukan komunikasi dengan Diskominfo yang dilakukan secara formal melalui surat pemberitahuan terkait program dan desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Diskominfo kemudian menindaklanjuti dengan membuat link kelurahan sesuai penunjukan BPS. Hal ini menunjukkan komunikasi formal yang jelas dan terstruktur. Komunikasi Badan Pusat

Statistik dengan Disdukcapil dilakukan melalui surat resmi untuk permintaan data, tetapi dalam praktiknya pengiriman surat dapat dilakukan melalui media yang lebih praktis seperti WhatsApp atau diserahkan langsung ke bagian umum. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Komunikasi dalam pelaksanaan Program Kelurahan Cantik di Kelurahan Sumahilang telah dilakukan dengan memadukan jalur formal dan informal, mengedepankan kejelasan, konsistensi, serta keterbukaan antar pihak. BPS Kota Pekanbaru bersama Diskominfo, Disdukcapil, serta Kelurahan Sumahilang telah membangun pola komunikasi yang mendukung jalannya program, mulai dari penyampaian instruksi, permintaan data, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang muncul. Pola komunikasi ini mendukung keberhasilan implementasi program karena memastikan bahwa setiap kendala yang muncul dapat segera dikomunikasikan dan dicarikan solusinya. Hal ini selaras dengan teori George Edward III yang menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, konsisten, dan efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Tersedianya sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta fasilitas dan infrastruktur yang memadai merupakan syarat utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Kelurahan Cantik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ke BPS Kota Pekanbaru, Kelurahan Sumahilang, Diskominfo Kota Pekanbaru serta Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Di BPS Kota Pekanbaru keterbatasan jumlah SDM menjadi salah

satu tantangan dalam pelaksanaan program. Dengan keterbatasan ini diatasi oleh BPS dengan melibatkan seluruh staff BPS yang dibagi per kelurahan sebagai pembina dan bertanggung jawab terhadap kelurahan tersebut hingga menghasilkan output yang diharapkan. Sementara di Kelurahan Sumahilang, jumlah SDM masi terbatas, hal ini dapat dilihat dari masih banyak nya kasi yang kosong di kelurahan sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Selain itu Diskominfo dan Disdukcapil ketersediaan SDM cukup memadai hal ini dapat dilihat dari Diskominfo dapat menjalankan tugas nya tanpa hambatan dalam hal dukungan teknologi berupa penyedia link kelurahan untuk program. Disdukcapil juga mampu menyediakan data apa saja yang diminta oleh BPS dengan cepat sesuai dengan format data yang diminta oleh BPS.

Selain sumber daya manusia, sumber daya dana juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil temuan, pelaksanaan program Kelurahan Cantik di kelurahan Sumahilang meskipun mendapat dukungan dari pihak Diskominfo dan Disdukcapil yang telah menyiapkan data yang memadai, namun ditingkat kelurahan sarana dan prasarana dan SDM masi terbatas. sementara Kelurahan Sumahilang hanya memiliki satu unit komputer untuk mendukung seluruh operasional kelurahan. Selain itu kualitas jaringan internet dan di kelurahan maupun di Diskominfo juga masih belum optimal sehingga menghambat terhadap aplikasi dan web program.

3. Disposisi

Komitmen dan dedikasi para pelaksana program, dalam hal ini Badan Pusat Statistik, disdukcapil, diskominfo, serta aparatur kelurahan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada Diskominfo Kota Pekanbaru, Disdukcapil Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, serta Kelurahan Sumahilang maka dapat disimpulkan bahwa keseriusan BPS dalam pelaksanaan program Kelurahan Cantik dapat dilihat dari keterlibatan seluruh staff BPS untuk mendukung pelaksanaan program Desa Cantik, menunjuk pembina masing-masing kelurahan serta melakukan pembinaan rutin ke kelurahan.

Sementara keseriusan Diskominfo Kota Pekanbaru dapat dilihat dari komitmen dalam mendukung pelaksanaan program, terutama dalam menyediakan link khusus masing-masing kelurahan serta mengupayakan solusi terhadap kendala server dan jaringan. Keseriusan Disdukcapil dapat dilihat dari komitmen dalam menyediakan data yang dibutuhkan BPS dalam program Kelurahan Cantik. Disamping itu, Keseriusan Kelurahan Sumahilang dapat dilihat dari adanya agen statistik kelurahan dan rutin berkonsultasi kepada BPS untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program Kelurahan Cantik

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa disposisi para pelaksana Program Kelurahan Cantik di Kelurahan Sumahilang sudah mendukung implementasi kebijakan dengan baik. Para pelaksana memiliki komitmen yang tinggi, tanggung jawab dan

kesediaan bekerja untuk mencapai tujuan program.

4. Struktur Birokrasi

Desain struktur birokrasi yang sesuai dapat memfasilitasi pelaksanaan program dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan berbelit belit dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Pelaksanaan program Kelurahan Cantik yang dibina oleh BPS Kota Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu setiap kegiatan dalam program ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik serta diperkuat dengan Edaran Walikota Pekanbaru mengenai Peran Aktif dan Kerja Sama dalam Pembinaan Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Hasil temuan bahwa, BPS Kota Pekanbaru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan Program Kelurahan Cantik. Ini dapat dilihat dari penugasan pembina khusus masing-masing kelurahan untuk pelaksanaan program. BPS juga bertanggung jawab terhadap dalam memberikan bimbingan, pembinaan rutin, serta memantau langsung perkembangan pelaksanaan program. Sementara Kelurahan Sumahilang juga melakukan tanggung jawabnya dengan baik sebagai pelaksana program ditingkat kelurahan. Kelurahan melibatkan agen statistik dan terus menjaga komunikasi kepada BPS untuk terus melaporkan kendala yang dialami dalam pelaksanaan program.

Dari implemenasi program Kelurahan Cantik Tahun 2024 menghasilkan beberapa output, yaitu :

1) Terbangunnya tata kelola data di Kelurahan

Tata kelola data yang telah dibangun ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kapasitas kelurahan dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data. Dengan demikian, Program Kelurahan Cantik tidak hanya menjadi kegiatan temporer, melainkan fondasi bagi penguatan budaya statistik dan pelayanan publik yang lebih baik di Kelurahan Sumahilang.

2) Tersedianyaa output statistik di kelurahan, seperti profil Kelurahan, Kelurahan dalam angka, Monografi kelurahan, website kelurahan, tabel statistik, dan Infografis.

3) Terbentuknya agen/komunitas statistik di kelurahan dengan adanya Surat Keputusan/ Surat Penunjukan Agen/Komunitas Statistik di Kelurahan

Dengan demikian, output program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma kerja aparatur menuju tata kelola data yang lebih sistematis dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa Program Kelurahan Cantik telah berjalan sesuai dengan tujuannya, yakni meningkatkan literasi data dan pelayanan publik berbasis data di tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini sudah berjalan cukup baik. Namun, banyaknya pihak yang terlibat sehingga kendala yang dialami oleh kelurahan cukup memakan waktu untuk segera diberikan solusinya. Hal ini menunjukkan adanya miskomunikasi antara pihak yang terlibat di dalam program. Dalam program ini juga masih diperlukan adanya sosialisasi secara rutin dari pihak BPS ke aparat kelurahan Sumahilang walaupun program ini sudah dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan program ini sangat diperlukan adanya kuantitas dan kualitas para pelaksana program. Kurangnya staff di BPS dan di Kelurahan Sumahilang menjadi hambatan dalam melaksanakan program. Selain itu kualitas aparat kelurahan dalam pemahaman terkait program masih minim hal ini dikarenakan adanya pengaruh tingkat pendidikan di staff kelurahan.

Selain itu, Tidak adanya dukungan dana dari pemerintah kota Pekanbaru menjadi hambatan juga dalam pelaksanaan program ini. Anggaran program ini hanya berasal dari BPS Kota Pekanbaru dan tidak didukung dengan kualitas aparat mengelola dana tersebut

Minimnya Sarana dalam pelaksanaan program ini, dimana ketersediaan komputer di kelurahan yang sangat terbatas dan digunakan bersama oleh staff kelurahan. Satu komputer yang tersedia menampung seluruh program kerja sehingga staff kelurahan harus bergantian dalam menggunakan komputer. Selain itu

kondisi internet di kelurahan juga masih kurang baik, sehingga untuk mengakses web kelurahan untuk pengiriman dan pengolahan data ke web kelurahan menjadi terhambat.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan program si cantik, sangat diperlukan sebuah komitmen yang kuat terutama pihak yang melaksanakan. Dalam temuan ini menunjukkan bahwa, adanya keseriusan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun adanya ketidakmerataan dalam memberikan perhatian pada kelurahan Sumahilang, dikarenakan posisinya hanya sebagai kelurahan pendukung sehingga pihak pelaksana masih kurang dalam memberikan dukungan secara maksimal seperti kelurahan utama yang terpilih. Disamping itu, banyaknya program yang harus diikuti Kelurahan Sumahilang, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki. Rendahnya disposisi yang dimiliki pada proses pelaksanaan program si cantik, membuat proses pelaksanaan program tersebut terlaksana secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan wewenang. Dalam pelaksanaan program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dasar hukum yang jelas. Namun karena banyaknya pihak yang terlibat, proses koordinasi sering berjalan dengan lambat. Akibatnya terjadi kompleksitas pada saat proses pelaksanaan program membuat pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara cepat. Selain itu SOP yang digunakan masih bersifat umum dan belum cukup luwes untuk menyesuaikan dengan tantangan teknis yang muncul di lapangan.

SIMPULAN

Pelaksanaan program Kelurahan Cantik di Kelurahan Sumahilang berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari komunikasi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program yaitu Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru sebagai Pembina program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia data kependudukan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai penyedia link website kelurahan serta Kelurahan Sumahilang sebagai kelurahan pelaksana. Sumber daya manusia yang masih terbatas di BPS Kota Pekanbaru dan Kelurahan Sumahilang, anggaran yang berasal dari BPS Kota Pekanbaru serta masih minimnya sarana dan prasarana di kelurahan. Sikap dan keseriusan pihak yang terlibat dalam program ini menunjukkan dedikasi dan kesungguhan serta pelaksanaan program yang didasarkan pada SOP yang berlaku yang UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik serta SE Walikota Pekanbaru tahun 2024.

Hambatan dalam pelaksanaan ini ialah masih kompleksitasnya alur komunikasi yang dilakukan sehingga masalah yang didapat saat pelaksanaan cukup memakan waktu untuk di berikan solusi, anggaran yang hanya berasal dari BPS sehingga diperluka pengelolaan yang baik untuk hal tersebut,. Pihak yang terlibat sudah memiliki sikap yang positif terhadap program namun masih diperlukannya sosialisasi berkelanjutan di Kelurahan Sumahilang meskipun program sudah selesai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, E. S. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan

Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB* , 1-14.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.

Agwi, W. (2024). Desa Cantik, Desa Cakap Statistik. *Journal of Human and Education* , 607-614.

Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* , 1-11.

Ananda, R. (2018). *Statistik Pendidikan (Teori dan Praktik dalam Pendidikan)*. Medan: CV. Media Puspita.

Anisa Fitri, R. R. (2023). *Dasar-Dasar Statistika Untuk Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.

Ansar, A. (2023). Pembuatan dan Pemanfaatan Website Sebagai Pendukung Terwujudnya Desa Cantik. *JURNAL ABMAS NEGERI* , 90-96.

Arisman Adnan, N. E. (2023). Visualisasi Data SDGs Desa: Program Desa Cantik di Desa Alahair, Meranti, Riau . *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* , 350-355.

As' ari, H., Gusliana, H. B., Umami, I. M., Habibie, D. K., & Putri, R. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 6352-6359.

Desrinelty, M. A. (2021). Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan . *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* , 83-88.

Desy Yuliana Dalimunthe, R. A. (2023). Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat Melalui Sosialisasi Pendampingan Desa Cinta Statistik di Kelurahan Bukit Padang , Kabupaten Bangka. *Seminar Nasioal*

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat , 1-3.

Fauziah, A. (2024). Pengolahan dan Analisis Data Untuk Mendukung Program Desa Cinta Statistik di Sokewara. *Indonesian Journal of Community Service and Innovation* , 52-63.

Habibie, D. K. (2018). Dwi fungsi media massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79

Kholif, N. N. (2025). Penerapan Konsep Good Governance Pada Pembinaan Desa Cantik (Cinta Statistik) Studi Kasus Dalam Program Kampung Madani di Kelurahan Gayungan. *FUTURE ACADEMIA* , 330-345.

Kholishah Isnaini, L. K. (2025). The Effectiveness of the Desa Cantik Program in Village Data Management. *Jurnal Sintak* , 71-76.

Kusuma, U. A. (2024). Pengenalan Desa Cinta Statistik (Cantik) dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 1-9.

Mariani, D. R. (2023). Implementasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Situbondo. *Pubmedia Social Sciences and Humanities* , 1-10.

Mariati Purnama Simanjuntak, L. S. (2020). *Pengembangan Program Dalam Pembelajaran*. Jakarta Utara: Pustaka Media Guru.

Maulidya, R. (2022). Analisis Retrospektif kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah ilmu Administrasi Negara* , 273-287.

Mulyadi. (2017). Manajemen Program Pembangunan di Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , 112-123.

Nalien, E. M. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming di Pemerintahan

Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintah* , 1-13.

Novita Tresiana, N. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Suluh Media.

Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Journal of Science and Research* , 38-46.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Rauf, R. (2015). *PEMERINTAHAN DESA*. Pekanbaru: ZANAFI PUBLISHING.

Restu Lusiana, W. M. (2024). Pelatihan Pengolahan Administrasi Data Desa untuk Mewujudkan CANTIK (Cinta Statistika) bagi Perangkat Desa di Kantor Desa Kerik Kecamatan Takeran. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* , 31-39.

Sueca, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Medan: SEFA BUMI PERSADA.

Sutrisno. (2018). Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 45-60.

Syamsul Bahri, B. S. (2020). *Model Implementasi Program Penjamin Mutu*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.

Wahyuni, S. (2021). *Dasar-Dasar Statistik*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Warsono. (2024). Pembinaan Desa Cinta Statistik Bagi Perangkat Desa Panutan Sebagai Upaya Penyelenggaraan Statistik Desa Berkesinambungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 671-679.

Warsono, M. U. (2024). Pembinaan Desa Cinta Statistik Bagi Perangkat Desa Panutan Sebagai Upaya Penyelenggaraan Statistik Desa Berkesinambungan. *SWARNA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 671-679.

Widiarti, D. K. (2025). Pelatihan Pembuatan Infografis Desa dalam Rangka Mendukung Program Desa Cantik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: TAPIS BERSERI* , 7-12.